

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pilkada merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan di daerah. Pilkada dilaksanakan untuk memilih kepala daerah yang fungsinya mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pilkada merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya atas dasar penyerahan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat menurut asas desentralisasi. Pilkada merupakan tombak utama dalam pemerintahan pemerintah daerah. Pilkada menempatkan masyarakat secara langsung sebagai subjek.

Pada tahun 2020, daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak sebagai sarana suksesi kekuasaan, pilkada yang diselenggarakan secara langsung adalah perangkat baru dalam demokrasi Indonesia yang dimulai pertama kali pada bulan Juni tahun 2005 dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Dalam 15 (lima belas) tahun perjalanannya, pilkada dihadapkan berbagai tantangan yang harus diselesaikan agar cita-cita mencapai demokrasi substantif tercapai. Pilkada yang sukses diharapkan menjadi sarana suksesi kekuasaan yang menghasilkan pejabat berkualitas yang mampu memenuhi harapan rakyat.

Tantangan pada pilkada serentak 2020 masih terbentur pada pola yang sama. Tak ada tanda perubahan dari partai politik untuk melakukan pembenahan

mekanisme rekrutmen politik secara demokratis. Banyak kader-kader militan partai yang tersisihkan oleh calon non-kader partai dan hanya bermodalkan kapital besar atau memiliki hubungan kekerabatan/kekeluargaan dengan patron tertentu yang juga adalah elit partai. Akibatnya terjadi dramatisasi kader partai yang *walkout* dari partai politik karena kecewa oleh keputusan elit partai.

Tantangan lain datang dari eksekusi negatif otonomi daerah yang melahirkan raja-raja kecil, dimana pemerintahan daerah dikuasai oleh keluarga tertentu/dinasti politik yang memiliki penyebaran yang merata hampir di seluruh tanah air. Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (1960) menegaskan bahwa sirkulasi elite akan melahirkan para pemimpin baru yang menduduki struktur dan organisasi baru. Sirkulasi politik menjadi kontrol bagaimana sebuah kekuasaan dijalankan. Sirkulasi elite yang sehat dibutuhkan, karena Pareto begitu percaya bahwa tidak ada elit yang mau menyerahkan kekuasaannya secara sukarela kepada elit yang lain, walau elit tersebut sudah mencapai tahap membusuk. Tidak berlebihan, jika sirkulasi elite disebut sebagai sarana “*me-refresh* kepemimpinan pemerintahan daerah”.

Pemilihan kepala daerah secara serentak telah menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia. Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yang menggantikan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Oleh karena itu, dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung (Hollyson, 2015:158). Selanjutnya UU tersebut direvisi kembali dalam UU No. 8 Tahun 2015, berisi perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1

tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Salah satu hal menarik dari undang-undang no. 8 Tahun 2015, dan justru salah satu syarat bagi calon kepala daerah dan wakilnya, yaitu tidak adanya ikatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (r), yang menyatakan tidak ada benturan kepentingan bagi petahana. . Jika dicermati dengan benar, pasal ini merupakan upaya untuk mencegah adanya dinasti politik di daerah. Terlihat pada masa ini, dinasti politik mulai menyebar ke berbagai daerah. Dinasti politik ini bisa muncul karena tidak adanya aturan yang menjadi regulasi khusus untuk membatasinya.

Salah satu celah negatif dari pelaksanaan pilkada adalah munculnya fenomena dinasti politik. Gejala dinasti politik ini diindikasikan dengan pewarisan kekuasaan secara turun temurun di lingkungan keluarga tertentu, baik yang langsung memiliki keterkaitan hubungan darah atau sanak saudara yang terikat dalam hubungan kekerabatan.

Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Hal ini meningkatkan kekhawatiran, bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadikan dinasti politik ini turun-menurun bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan (Synder, 155:2009).

Dinasti politik merupakan kekuasaan yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Kekuatan yang bersumber dari ikatan kekeluargaan ini diyakini tidak akan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan umum dan pembangunan daerah. Dinasti politik yang berkuasa secara terus menerus dan turun temurun ini akhirnya menjadi sebuah dinasti politik daerah yang sulit dikalahkan dalam pemilu manapun. Dengan cara ini, kekuatan yang sudah dimiliki bisa menjadi langgeng bagi keluarga elit.

Dari data yang peneliti peroleh, partisipasi politik masyarakat Desa Babakan mencapai 75 persen. DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pilkada Kabupaten Bandung yang tersebar di Desa Babakan Kecamatan Ciparay yang sudah disahkan oleh KPUD Kabupaten Bandung berjumlah 6.648 pemilih dengan komposisi Laki-laki 3.212 pemilih dan perempuan 3.436 pemilih. DPT yang ditetapkan merupakan perbaikan dari DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang sebelumnya sudah dikoreksi bersama Petugas Pemutakhiran Data Penduduk (PPDP) dengan RT/RW termasuk dengan calon kepala desa yang berjumlah 6.542 pemilih.

Dalam pemaparan pada rapat penetapan DPT, perbaikan DPT meliputi penambahan dan pengurangan pemilih. Penambahan pemilih dikarenakan sebelumnya belum terdaftar dalam DPS padahal memenuhi persyaratan sebagai pemilih, penduduk baru yang sudah 6 bulan memiliki bukti kependudukan Desa Babakan dan pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat 17 tahun pada hari pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung 2020 yang belum terdaftar dalam DPS. Jumlah penambahan dalam DPT sebanyak 89 pemilih. Sedangkan pengurangan pemilih disebabkan karena meninggal dunia, pindah dan pemilih

ganda dalam DPS sebanyak 72 pemilih. Dari total 6.648 pemilih, tersebar di Dusun I sebanyak 1.575 Pemilih (laki-laki 787, perempuan 788). Dusun II sebanyak 1.099 pemilih (laki-laki 527 dan perempuan 572), Dusun III 1.041 Pemilih (laki-laki 497, perempuan 544), Dusun IV 1.406 Pemilih (laki-laki 700, perempuan 706) dan Dusun V 1.528 pemilih (laki-laki 744, perempuan 784).

Pada pilkada daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2020 yang diikuti 68.74% pemilih yang menggunakan hak pilihnya, suara dimenangkan oleh pasangan H. M Dadang Supriatna, S. Ip., M. Si dan H. Sahrul Gunawan, SE berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bandung dengan suara sebesar 55.9% atau 929677 suara. Sedangkan pasangan Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi, SB, M. Si memperoleh suara 30.8% atau 512308 suara dan pasangan Hj. Yena Iskandar Masoem, S. Si Apt dan Atep memperoleh suara 13.2% atau 219766 suara (KPU Kab.Bandung).

Gambar 1.1 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020



Sumber: KPUD Kabupaten Bandung

Hal menarik dari Pilkada Kabupaten Bandung adalah munculnya fenomena dinasti politik yang bagi sebagian masyarakat Kabupaten Bandung dianggap sebagai ambisi kekuasaan elit keluarga tertentu. Semua itu karena diramaikan dengan isu dinasti politik pada Pilkada Kabupaten Bandung karena majunya Kurnia Agustina sebagai calon bupati yang notabene sebagai istri Bupati Bandung Dadang M. Naser. Kurnia Agustina berpasangan dengan Usman Sayogi yang di usung oleh partai Golkar dan Gerindra. Seperti yang diketahui Kurnia Agustina ini adalah istri Bupati Bandung Dadang M. Naser yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah partai Golkar Kabupaten Bandung.

Fenomena dinasti politik ini menjadi salah satu isu sentral dalam perbincangan, diskusi dan obrolan sebagian masyarakat menjelang hari pemilu digelar. Bagi para pendukung pasangan nomor Urut 1 (Kurnia Agustina – Usman Sayogi), mereka tetap setia menyatakan dukungannya apapun yang terjadi. Namun, bagi sebagian masyarakat yang menginginkan perubahan dan pemimpin baru di Kabupaten Bandung, mereka mengalami kegelisahan karena ketakutan akan berlanjutnya dinasti politik di Kabupaten Bandung. Karena sebelumnya, selama sepuluh tahun Kabupaten dipimpin oleh H. Obar Sobarna. Setelah dua periode itu, kekuasaan berlanjut ke menantunya H. Dadang Naser yang juga sudah sepuluh tahun berkuasa di Kabupaten Bandung. Karena itulah, masalah ini sangat menarik peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Persepsi Masyarakat tentang Dinasti Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak 2020** (Studi Kasus di Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung).

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari hasil pemaparan diatas peneliti berusaha merumuskan fokus permasalahan dengan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Secara historis pelaksanaan Pilkada sejak dilaksanakan tahun 2015, 2017 dan 2018 di berbagai daerah selalu menyisakan problematika yang tak berkesudahan, dari mulai pembengkakan biaya, politik uang hingga mencuatnya dinasti politik
2. Pilkada di Kabupaten Bandung menarik untuk dicermati karena hembusan dinasti politik mulai menguat semenjak hampir dua dekade terakhir, dengan kata lain sudah dua puluh tahun elit keluarga tertentu berkuasa di Kabupaten Bandung.
3. Isu dinasti politik ini menancap secara langsung dan tidak langsung dalam benak masyarakat Desa Babakan sehingga mereka memiliki persepsi yang berkonotasi positif tentang dinasti politik atau sebaliknya, berkonotasi negatif.
4. Fenomena dinasti politik ini berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat Desa Babakan yang menginginkan pemimpin baru dan perubahan baru di Kabupaten Bandung.
5. Partisipasi politik masyarakat Desa Babakan bisa ditinjau melalui pendekatan sosiologis, psikologis dan pendekatan rasional.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tentang Persepsi Masyarakat Desa Babakan tentang Dinasti Politik terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, akhirnya memantik munculnya rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Babakan terhadap dinasti politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung?
2. Bagaimana pengaruh dinasti politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat Desa Babakan?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi masyarakat Desa Ciparay terhadap terbentuknya dinasti politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dinasti politik dalam pilkada Kabupaten Bandung, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Babakan terhadap politik dinasti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
2. Untuk menganalisis pengaruh dinasti politik terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat Desa Babakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Desa Babakan terhadap terbentuknya dinasti politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sesuatu yang diharapkan dari penelitian ini adalah kebermanfaatan. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.



## 1. Kegunaan teoretis

- a. Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu ikut berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Politik, khususnya dalam kajian politik pada pilkada Kabupaten Bandung khususnya bidang dinasti politik.
- b. Peneliti pun berharap pada penelitian ini menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dinasti politik dan pilkada serentak.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung dan bagi masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya.

## F. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa hal-hal pokok yang dijadikan landasan berfikir dalam penelitian ini, untuk memperjelas dan memfokuskan terhadap masalah dan topik yang hendak dikaji, adapun beberapa pengertian tentang permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

Menurut *Business Research* yang di kemukakan dalam Sugiyono (Sugiyono, 2015:60) berpendapat bahwa kerangka berpikir sebagai suatu model konseptual mengenai kaitan teori dengan faktor-faktor yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan yang berpengaruh. Kerangka berfikir dapat dikatakan tepat apabila dapat menjelaskan hubungan teori dengan berbagai variabel yang hendak dikaji.

Teori adalah satu set proposisi yang menyatakan secara logis saling hubungan antara dua atau lebih konsep (variable) untuk tujuan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara fenomena. Jadi bisa dikatakan juga bahwa kerangka

pemikiran adalah satu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Ulber Silalahi, 2009).

Teori-teori merupakan rangkaian konseptual dalam memberikan deskripsi terhadap persoalan yang sedang dikaji. Dinasti politik yang dimana suatu fenomena yang dikaitkan dengan pemegang kekuasaan kekeluargaan pada pemegang kekuasaan terdahulu dan digantikan dengan keluarga yang mempunyai hubungan seperti contohnya anak, istri, menantu dan lainnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti melakukan pengkajian melalui pendekatan secara teori. Pengumpulan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan dari teori yang dipergunakan adalah melalui pendekatan keilmuan Ilmu Politik yang berkaitan dengan dinasti politik.

Dinasti politik adalah rangkaian sebuah strategi guna menciptakan sistem politik yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah kekuasaan yang dimana kekuasaan ini menjadikan pihak yang mewarisi dari ikatan kekeluargaan dan sistemnya pada pewaris kekuasaan sebelumnya. Dinasti politik daerah yang memang arahnya pada bentuk kekuasaan tanpa syarat yang menjadikan rentan terjadinya salah guna pada kekuasaan, yang dimana seharusnya untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan sendiri dan kerabatnya. Maka dari itu pewarisan yang dilakukan pada kekuasaannya dilakukan didapatnya pada saat pilkada berlangsung (Hollyson dan Sundari, 2015:149).

Dilihat pada dinasti politik dalam pilkada 2020 yang banyak diberitakan ini memberi dampak negatif dalam pilkada, seperti yang dikatakan oleh pengamat politik dari universitas Nurtanio, Djamu Kertabudi menilai bahwasannya di

bandung sendiri banyaknya dinasti politik yang terjadi yang dilihat pada isu Dadang Nasher yang menjabat sebagai Bupati Kanupaten Bandung ia juga menjadi Ketua Umum Golkar Kabupaten Bandung maka dari itu ia mencalonkan istrinya sebagai Bupati Bandung (pikiranrakyat.com).

Maka dari itu penelitian ini mengambil kajian dari yang telah di sampaikan dalam kerengaka pemikiran agar mengetahuinya letak efek dari dinasti politik ini dan relevansiya sebagai berikut :

1. Persepsi dari masyarakat terhadap dinasti politik.
2. Dampak positif dinasti politik.
3. Dampak negatif dinasti politik.
4. Dinasti politik dan partisipasi politik

Peneliti melihat bahwa adanya keresahan yang dialami masyarakat dari adanya dinasti politik ini yang memang harus adanya pengkajian dengan secara holistik agar ketimpangan yang terjadi pada masyarakat menjadi signifikan dan karena adanya kasus-kasus yang ada dalam dinasti politik yang harus dikaji ini.

**Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran**